

## ***Mediatization* Komunikasi Pemerintah melalui Forum Wartawan Industri**

Rohimat Nurbaya<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Komunikasi, Universita Paramadina, Kampus Kuningan, Jakarta Selatan

E-Mail: [rohimat.nurbaya@students.paramadina.ac.id](mailto:rohimat.nurbaya@students.paramadina.ac.id)

**Abstrak**–Komunikasi publik pemerintah menjadi instrumen penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Dalam praktiknya, penyampaian informasi kebijakan kepada masyarakat tidak hanya dilakukan melalui kanal resmi pemerintah, tetapi juga melalui kerja sama dengan media massa yang secara rutin meliput aktivitas kementerian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Forum Wartawan Industri (Forwin) berperan dalam proses penyebaran informasi kebijakan serta pembentukan narasi komunikasi pemerintah di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat humas Kementerian Perindustrian, wartawan anggota forum, wartawan non-forum, serta pengamat komunikasi. Penelitian juga dilengkapi dengan analisis dokumen berupa siaran pers dan publikasi resmi kementerian. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Forum Wartawan Industri berperan dalam memperluas distribusi informasi kebijakan industri melalui jaringan media para wartawan, memfasilitasi koordinasi komunikasi antara pemerintah dan media, serta berkontribusi dalam penyelarasan narasi kebijakan dalam pemberitaan media. Selain itu, interaksi yang intens antara pemerintah dan media menunjukkan adanya penyesuaian strategi komunikasi pemerintah terhadap logika media. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik komunikasi publik di Kementerian Perindustrian mencerminkan proses mediatization of government, yaitu kondisi ketika strategi komunikasi pemerintah semakin dipengaruhi oleh kebutuhan media dalam proses penyebaran informasi kebijakan kepada publik.

**Kata Kunci:** Komunikasi Pemerintahan, Relasi Media dan Pemerintah, Narasi Kebijakan Publik, Logika Media, Transparansi Informasi Publik

**Abstract**–Government public communication plays an important role in supporting transparency and accountability in public governance. In practice, the dissemination of policy information to the public is not only conducted through official government channels but also through collaboration with mass media that routinely cover ministerial activities. This study aims to analyze the role of the Industrial Journalists Forum (Forwin) in the dissemination of policy information and the formation of government communication narratives within the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia. This research employs a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews with public relations officials of the Ministry of Industry, journalists who are members of the forum, non-forum journalists, and communication scholars. The study was also supported by document analysis of press releases and official publications issued by the ministry. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles and Huberman, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the Industrial Journalists Forum plays a role in expanding the dissemination of industrial policy information through journalists' media networks, facilitating communication coordination between the government and the media, and contributing to the alignment of policy narratives in media coverage. In addition, the intensive interaction between the government and the media reflects the adaptation of government communication strategies to media logic. These findings suggest that public communication practices within the Ministry of Industry illustrate the process of mediatization of government, in which government communication strategies increasingly adapt to media needs in order to effectively disseminate policy information to the public.

**Keywords:** Government Communication, Media–Government Relations, Policy Narratives, Media Logic, Public Information Transparency

### **1. PENDAHULUAN**

Komunikasi publik pemerintah merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas tata kelola pemerintahan. Melalui komunikasi publik yang terstruktur, pemerintah dapat menyampaikan informasi kebijakan, program pembangunan, serta capaian kinerja kepada masyarakat secara luas [1]. Dalam praktik komunikasi modern, media massa menjadi salah satu aktor penting dalam proses tersebut karena berfungsi sebagai perantara antara pemerintah dan publik dalam mendistribusikan informasi kebijakan. Media tidak hanya berperan sebagai saluran penyebaran informasi, tetapi juga sebagai ruang diskursus publik yang mempengaruhi bagaimana kebijakan pemerintah dipahami oleh masyarakat [1], [6].

Perkembangan ekosistem media dalam beberapa tahun terakhir mendorong munculnya berbagai kajian mengenai komunikasi pemerintah dan hubungan pemerintah dengan media. Penelitian Hansson menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah semakin dipengaruhi oleh dinamika media dan perkembangan platform komunikasi digital yang membentuk cara pemerintah menyampaikan informasi kepada publik [1]. Sementara itu, Patria menjelaskan bahwa fenomena mediatization telah mengubah praktik komunikasi pemerintah, di mana institusi pemerintah semakin menyesuaikan strategi komunikasinya dengan logika media agar pesan kebijakan dapat disampaikan secara efektif [2]. Penelitian lain juga menekankan pentingnya praktik government public relations dalam membangun kepercayaan publik melalui strategi komunikasi yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat [3], [4]. Selain itu, kajian mengenai



strategi komunikasi pemerintah menunjukkan bahwa media memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan informasi kebijakan serta membentuk persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah [5].

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah membahas komunikasi pemerintah, sebagian besar kajian masih berfokus pada strategi komunikasi pemerintah secara umum, penggunaan media digital dalam komunikasi kebijakan, serta peran *public relations* pemerintah dalam membangun kepercayaan publik. Penelitian yang secara khusus mengkaji peran forum wartawan sebagai ruang interaksi antara pemerintah dan jurnalis dalam proses pembentukan narasi komunikasi pemerintah masih relatif terbatas. Padahal dalam praktik komunikasi pemerintahan di Indonesia, forum wartawan sering menjadi salah satu mekanisme informal yang memfasilitasi pertukaran informasi antara pemerintah dan media dalam proses peliputan kebijakan publik.

Dalam konteks tersebut, keberadaan Forum Wartawan Industri (Forwin) di lingkungan Kementerian Perindustrian menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut. Forum ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah koordinasi antara jurnalis dan pemerintah dalam kegiatan peliputan, tetapi juga menjadi ruang komunikasi yang berpotensi mempengaruhi proses penyebaran informasi kebijakan serta pembentukan narasi pemerintah dalam pemberitaan media. Interaksi yang terjadi antara pemerintah dan forum wartawan juga menunjukkan dinamika komunikasi yang berkaitan dengan konsep *mediatization of government*, yaitu kondisi ketika strategi komunikasi pemerintah semakin dipengaruhi oleh kebutuhan dan logika media dalam proses penyebaran informasi kebijakan kepada publik [2].

Berdasarkan uraian tersebut, **penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam mengkaji peran forum wartawan sebagai aktor komunikasi yang berperan dalam proses distribusi informasi kebijakan dan pembentukan narasi komunikasi pemerintah di tingkat kementerian.** Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti strategi komunikasi pemerintah secara umum, penelitian ini secara khusus menganalisis dinamika komunikasi antara pemerintah dan forum wartawan sebagai bagian dari praktik komunikasi publik pemerintah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Forum Wartawan Industri (Forwin) berperan dalam proses penyebaran informasi kebijakan serta pembentukan narasi komunikasi pemerintah di Kementerian Perindustrian melalui perspektif *mediatization of government*.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam dinamika komunikasi antara pemerintah dan media dalam praktik komunikasi publik di lingkungan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna, persepsi, serta interpretasi para aktor komunikasi terhadap hubungan pemerintah dan media dalam proses penyebaran informasi kebijakan [6]. Metode studi kasus digunakan untuk mengkaji secara spesifik praktik komunikasi publik yang berlangsung dalam aktivitas komunikasi pemerintah yang melibatkan Forum Wartawan Industri (Forwin) sebagai mitra media kementerian.

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pusat Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, khususnya pada ruang konferensi pers dan area kegiatan peliputan media, serta Universitas Paramadina sebagai lokasi wawancara dengan informan akademisi. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan keterlibatan dan relevansi mereka terhadap praktik komunikasi antara pemerintah dan media. Informan penelitian terdiri dari delapan orang yang memiliki peran langsung dalam praktik komunikasi publik pemerintah maupun kajian akademik komunikasi.

Untuk menjaga etika penelitian dan kerahasiaan informan, identitas narasumber dalam penelitian ini disajikan menggunakan kode informan. Klasifikasi informan penelitian disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Klasifikasi informan penelitian

Kode Informan	Kategori Informan	Kategori Informan
IH1	Pejabat Humas Kemenperin	Pengelola komunikasi publik dan media relations
IH2	Pejabat Humas Kemenperin	Koordinator kegiatan publikasi dan konferensi pers
IW1	Wartawan Forum Wartawan Industri	Wartawan anggota forum yang meliput sektor industri
IW2	Wartawan Forum Wartawan Industri	Wartawan anggota forum yang meliput sektor industri
IN1	Wartawan Non-Forum	Wartawan media nasional yang meliput isu industri
IN2	Wartawan Non-Forum	Wartawan media ekonomi independen
IA1	Akademisi/Pengamat Komunikasi	Wartawan media ekonomi independen
IA2	Akademisi/Pengamat Komunikasi	Peneliti komunikasi publik dan komunikasi pemerintahan

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara semi-terstruktur yang dirancang untuk menggali pandangan informan mengenai praktik komunikasi publik pemerintah, hubungan antara pemerintah dan media, serta peran forum wartawan dalam penyebaran informasi kebijakan. Pedoman wawancara disusun



berdasarkan kerangka teori komunikasi pemerintah, mediatization of government, agenda-setting, serta media dependency theory.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para informan untuk memperoleh pemahaman mengenai pengalaman dan pandangan mereka terhadap praktik komunikasi antara pemerintah dan media. Wawancara dilakukan secara langsung maupun secara daring sesuai dengan ketersediaan informan. Kedua, observasi partisipatif pada beberapa kegiatan komunikasi publik kementerian seperti konferensi pers dan kegiatan peliputan media yang melibatkan wartawan. Ketiga, analisis dokumen, yang meliputi siaran pers kementerian, publikasi resmi, serta arsip pemberitaan media yang berkaitan dengan kebijakan industri nasional. Analisis dokumen digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari hasil wawancara.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) [7]. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan proses seleksi, pengkodean, serta pengelompokan data hasil wawancara dan dokumen penelitian berdasarkan tema-tema yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya pada tahap penyajian data, data yang telah dikategorikan disusun dalam bentuk narasi analitis untuk memudahkan peneliti memahami pola hubungan antara pemerintah dan media dalam praktik komunikasi publik. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses interpretasi data untuk menemukan pola hubungan, makna, serta implikasi dari praktik komunikasi antara Kementerian Perindustrian dan forum wartawan dalam proses penyebaran informasi kebijakan.

Untuk meningkatkan validitas penelitian, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai kategori informan, yaitu pejabat humas, wartawan forum, wartawan non-forum, serta akademisi. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi kegiatan komunikasi publik, serta analisis dokumen publikasi kementerian.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Peran Forum Wartawan dalam Komunikasi Publik Pemerintah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Forum Wartawan Industri (Forwin) memiliki peran penting dalam proses penyebaran informasi mengenai kebijakan sektor industri kepada masyarakat. Informan dari pihak humas Kementerian Perindustrian menyampaikan bahwa forum wartawan membantu mempercepat distribusi informasi kebijakan melalui jaringan media yang dimiliki oleh para jurnalis. Sebagaimana disampaikan oleh informan [IH1], forum wartawan menjadi salah satu mekanisme komunikasi yang mempermudah koordinasi antara pemerintah dan media dalam proses penyampaian informasi kebijakan kepada publik. Informan tersebut menjelaskan bahwa melalui forum tersebut, berbagai informasi terkait program dan kebijakan industri dapat segera diketahui oleh wartawan sehingga proses publikasi di media berlangsung lebih cepat.

Temuan ini juga diperkuat oleh pandangan wartawan anggota forum. Informan [IW1] menjelaskan bahwa keberadaan forum wartawan mempermudah jurnalis dalam memperoleh akses terhadap data, klarifikasi kebijakan, serta narasumber resmi dari kementerian. Menurutnya, forum wartawan menjadi ruang komunikasi yang membantu jurnalis memahami konteks kebijakan pemerintah sehingga pemberitaan yang dihasilkan dapat lebih akurat. Hal serupa juga disampaikan oleh [IW2] yang menyatakan bahwa forum wartawan memungkinkan terjadinya komunikasi yang lebih intens antara wartawan dan pejabat kementerian, sehingga proses konfirmasi informasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dibandingkan dengan mekanisme komunikasi yang bersifat formal.

Namun demikian, pandangan yang sedikit berbeda disampaikan oleh wartawan non-forum. Informan [IN1] menyatakan bahwa forum wartawan memang membantu mempercepat arus informasi dari pemerintah, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan kesan adanya kedekatan tertentu antara pemerintah dan sebagian media. Hal ini menurutnya berpotensi mempengaruhi cara wartawan memandang isu kebijakan pemerintah. Meskipun demikian, informan [IN2] menilai bahwa selama wartawan tetap mempertahankan independensi redaksional, keberadaan forum wartawan dapat tetap berfungsi sebagai sarana komunikasi yang membantu jurnalis memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai kebijakan industri.

Jika dilihat dari perspektif akademik, interaksi antara pemerintah dan forum wartawan tersebut dapat dipahami melalui konsep *government public relations* yang menekankan pentingnya hubungan kerja yang konstruktif antara pemerintah dan media dalam proses komunikasi kebijakan. Dalam konteks ini, media berperan sebagai mitra strategis dalam penyebaran informasi kebijakan kepada masyarakat [8]. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Kurniawan et al. yang menunjukkan bahwa strategi komunikasi pemerintah melalui media dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi kebijakan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah [4].

Selain itu, dinamika hubungan antara pemerintah dan forum wartawan juga menunjukkan karakteristik yang sejalan dengan konsep *mediatization of government*. Dalam perspektif ini, institusi pemerintah cenderung menyesuaikan strategi komunikasinya dengan kebutuhan media agar pesan kebijakan dapat lebih mudah dipublikasikan dan dipahami oleh masyarakat [2]. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa forum wartawan berfungsi sebagai ruang interaksi



yang memfasilitasi proses tersebut, di mana pemerintah menyediakan informasi kebijakan sementara wartawan memproses informasi tersebut menjadi pemberitaan yang dapat diakses oleh publik.

Dari sudut pandang teori ketergantungan media (*media dependency theory*), hubungan antara pemerintah dan media dalam forum wartawan juga menunjukkan pola ketergantungan yang bersifat timbal balik. Pemerintah membutuhkan media untuk memperluas jangkauan informasi kebijakan kepada masyarakat, sementara media membutuhkan akses terhadap sumber informasi yang kredibel dari pemerintah [6]. Informan [IA1] sebagai akademisi komunikasi menilai bahwa hubungan tersebut merupakan fenomena yang umum terjadi dalam praktik komunikasi publik pemerintah, karena kedua aktor memiliki kepentingan yang saling melengkapi dalam proses penyebaran informasi kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa forum wartawan memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat komunikasi publik pemerintah melalui penyebaran informasi kebijakan yang lebih cepat dan terkoordinasi. Namun demikian, temuan ini juga menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kedekatan komunikasi pemerintah dan media dengan prinsip independensi jurnalistik. Hal ini menjadi penting agar hubungan antara pemerintah dan media tetap mampu mendukung transparansi informasi publik tanpa mengurangi keberagaman perspektif dalam pemberitaan media.

### 3.2 Pengaruh Logika Media terhadap Komunikasi Pemerintah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik komunikasi publik pemerintah di Kementerian Perindustrian tidak lagi bersifat administratif dan satu arah, tetapi semakin dipengaruhi oleh dinamika kerja media massa. Informan dari unit humas kementerian menyampaikan bahwa penyusunan materi komunikasi publik saat ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan media agar informasi kebijakan lebih mudah dipublikasikan. Informan [IH1] menjelaskan bahwa dalam penyusunan siaran pers, struktur penulisan sering disesuaikan dengan format jurnalistik yang umum digunakan oleh media, seperti penggunaan judul yang informatif, penempatan kutipan pejabat sebagai elemen utama berita, serta penyajian data yang ringkas dan mudah dipahami oleh wartawan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah secara sadar menyesuaikan strategi komunikasinya agar selaras dengan pola kerja media.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh informan dari kalangan wartawan forum. Informan [IW1] menyatakan bahwa materi komunikasi yang disampaikan oleh kementerian sering kali telah dikemas dalam format yang siap dipublikasikan oleh media. Menurutnya, hal tersebut mempermudah wartawan dalam memproduksi berita karena informasi yang disampaikan telah memiliki unsur nilai berita yang relevan. [IW2] juga menambahkan bahwa penyusunan siaran pers yang mengikuti struktur jurnalistik membuat proses peliputan menjadi lebih efisien karena wartawan dapat dengan cepat memahami substansi kebijakan yang ingin disampaikan oleh pemerintah.

Namun demikian, perspektif yang lebih kritis disampaikan oleh wartawan non-forum. Informan [IN1] menilai bahwa penyesuaian komunikasi pemerintah terhadap kebutuhan media memang mempermudah proses peliputan, tetapi di sisi lain berpotensi membentuk kerangka pemberitaan tertentu yang telah diarahkan oleh sumber resmi pemerintah. Meskipun demikian, informan [IN2] menegaskan bahwa wartawan tetap memiliki otonomi redaksional dalam menentukan sudut pandang pemberitaan sehingga informasi dari pemerintah tetap harus melalui proses verifikasi dan interpretasi oleh media sebelum dipublikasikan.

Jika dianalisis secara konseptual, temuan penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh logika media dalam praktik komunikasi pemerintah. Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui konsep *mediatization of government*, yaitu kondisi ketika institusi pemerintah menyesuaikan praktik komunikasinya dengan logika kerja media agar pesan kebijakan dapat disampaikan secara lebih efektif kepada publik [2]. Dalam perspektif ini, media tidak hanya berperan sebagai saluran distribusi informasi, tetapi juga memengaruhi cara institusi pemerintah merancang strategi komunikasi publiknya.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan kajian Hansson yang menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah semakin dipengaruhi oleh dinamika media dan kebutuhan penyebaran informasi yang cepat kepada publik [1]. Selain itu, penelitian mengenai *government public relations* menekankan bahwa pemerintah perlu mengembangkan strategi komunikasi yang adaptif terhadap ekosistem media agar informasi kebijakan dapat tersampaikan secara efektif kepada masyarakat [3], [4]. Dengan demikian, penyesuaian strategi komunikasi pemerintah terhadap logika media dapat dipahami sebagai bagian dari upaya institusi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik.

Dari sudut pandang hubungan pemerintah dan media, kondisi tersebut juga mencerminkan pola ketergantungan yang saling melengkapi. Pemerintah membutuhkan media sebagai sarana utama untuk menyebarkan informasi kebijakan kepada masyarakat, sementara media membutuhkan akses terhadap sumber informasi resmi yang kredibel dari pemerintah. Hubungan timbal balik ini merupakan karakteristik yang umum dalam praktik komunikasi politik modern, di mana media dan institusi politik memiliki kepentingan yang saling berkaitan dalam proses produksi informasi publik [8].

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh logika media telah menjadi bagian penting dalam praktik komunikasi publik pemerintah di Kementerian Perindustrian. Penyesuaian strategi komunikasi terhadap kebutuhan media membantu memperluas jangkauan informasi kebijakan kepada masyarakat, namun pada saat yang sama menuntut adanya keseimbangan antara efektivitas komunikasi pemerintah dan independensi pemberitaan



media. Oleh karena itu, praktik komunikasi publik pemerintah dalam konteks ini dapat dipahami sebagai bagian dari proses *mediatization of government* yang semakin menguat dalam tata kelola komunikasi pemerintahan modern.

### 3.3 Hubungan Ketergantungan antara Pemerintah dan Media

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah dan media dalam praktik komunikasi publik di Kementerian Perindustrian memperlihatkan pola interaksi yang saling membutuhkan dalam proses penyebaran informasi kebijakan. Informan dari pihak humas kementerian menyatakan bahwa media massa menjadi salah satu saluran utama bagi pemerintah untuk menjangkau masyarakat secara luas. Informan [IH2] menjelaskan bahwa pemberitaan media memungkinkan informasi mengenai kebijakan industri dapat diketahui oleh publik secara lebih cepat dibandingkan dengan komunikasi langsung yang bersifat terbatas. Melalui jaringan media yang dimiliki oleh para jurnalis, berbagai informasi terkait program pembangunan industri, kebijakan sektor manufaktur, maupun perkembangan industri nasional dapat disebarluaskan kepada masyarakat secara lebih efektif.

Pandangan tersebut juga diperkuat oleh informan dari kalangan wartawan. Informan [IW2] menyampaikan bahwa keberadaan forum wartawan membantu jurnalis memperoleh akses terhadap informasi resmi yang dibutuhkan dalam proses peliputan. Menurutnya, wartawan membutuhkan sumber informasi yang kredibel dari pemerintah agar pemberitaan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara jurnalistik. Hal serupa disampaikan oleh [IW1] yang menyatakan bahwa akses terhadap narasumber resmi kementerian serta ketersediaan data industri dari pemerintah mempermudah wartawan dalam memahami konteks kebijakan yang sedang berkembang.

Namun demikian, perspektif yang lebih kritis muncul dari wartawan non-forum. Informan [IN1] menilai bahwa hubungan yang intens antara pemerintah dan media memang mempermudah proses peliputan, tetapi tetap perlu dijaga agar tidak mengurangi independensi pemberitaan media. Wartawan tetap memiliki tanggung jawab profesional untuk melakukan verifikasi informasi serta mempertimbangkan berbagai sudut pandang dalam pemberitaan kebijakan pemerintah. Informan [IN2] menambahkan bahwa kedekatan komunikasi antara pemerintah dan wartawan sebaiknya dipahami sebagai bentuk akses informasi, bukan sebagai bentuk kontrol terhadap isi pemberitaan media.

Dari perspektif akademik, hubungan timbal balik tersebut dapat dipahami melalui kerangka media *dependency theory*. Teori ini menjelaskan bahwa institusi sosial memiliki tingkat ketergantungan tertentu terhadap media dalam proses distribusi informasi kepada masyarakat [7]. Dalam konteks komunikasi publik pemerintah, ketergantungan tersebut muncul karena media memiliki kemampuan untuk menjangkau audiens yang luas serta membentuk pemahaman publik terhadap isu kebijakan yang berkembang. Oleh karena itu, pemerintah sering memanfaatkan media sebagai saluran utama dalam menyampaikan berbagai informasi kebijakan kepada masyarakat.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan kajian komunikasi politik yang menekankan bahwa hubungan antara institusi politik dan media pada dasarnya merupakan hubungan yang saling membutuhkan dalam proses produksi informasi publik [8]. McNair menjelaskan bahwa media memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan politik kepada masyarakat sekaligus membentuk ruang diskusi publik mengenai kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor yang mempengaruhi bagaimana informasi tersebut dipahami oleh masyarakat.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya mengenai komunikasi pemerintah, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa hubungan ketergantungan antara pemerintah dan media tidak hanya terjadi pada tingkat institusional, tetapi juga terbentuk melalui jaringan komunikasi yang lebih informal seperti forum wartawan. Hal ini sejalan dengan temuan Nurfalah et al. yang menunjukkan bahwa strategi komunikasi pemerintah dalam era media modern semakin bergantung pada berbagai bentuk interaksi dengan media untuk memastikan efektivitas penyebaran informasi kebijakan kepada publik [5]. Dengan demikian, forum wartawan dapat dipahami sebagai salah satu mekanisme komunikasi yang memperkuat hubungan antara pemerintah dan media dalam proses distribusi informasi kebijakan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah dan media dalam konteks komunikasi publik bersifat saling melengkapi. Pemerintah membutuhkan media untuk memperluas jangkauan informasi kebijakan kepada masyarakat, sementara media membutuhkan akses terhadap sumber informasi yang kredibel dari pemerintah. Interaksi tersebut memperlihatkan bahwa praktik komunikasi publik pemerintah tidak hanya bergantung pada mekanisme komunikasi formal, tetapi juga melibatkan jaringan komunikasi yang terbentuk melalui komunitas jurnalis yang secara aktif meliput sektor industri.

### 3.4 Forum Wartawan dan Pembentukan Narasi Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa forum wartawan memiliki peran penting dalam proses pembentukan narasi kebijakan yang berkembang di ruang publik melalui pemberitaan media. Informan dari unit humas Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa berbagai informasi kebijakan industri umumnya disampaikan kepada media melalui mekanisme komunikasi resmi seperti siaran pers, konferensi pers, maupun wawancara dengan pejabat kementerian. Informan IH1 menjelaskan bahwa forum wartawan menjadi salah satu ruang komunikasi yang memungkinkan penyampaian informasi kebijakan secara lebih terstruktur kepada para jurnalis yang secara rutin meliput sektor industri. Melalui forum tersebut, wartawan memperoleh gambaran awal mengenai substansi kebijakan, tujuan program, serta konteks isu industri yang sedang menjadi perhatian pemerintah.



Dari perspektif wartawan forum, informasi yang disampaikan oleh kementerian sering menjadi rujukan awal dalam proses peliputan kebijakan industri. Informan [IW1] menjelaskan bahwa data, pernyataan pejabat, serta penjelasan teknis yang diberikan oleh pihak kementerian membantu wartawan memahami konteks kebijakan yang sedang berkembang. Menurutnya, informasi resmi dari pemerintah sering menjadi dasar awal dalam penyusunan berita sebelum wartawan melengkapi laporan dengan sumber tambahan. [IW2] juga menyampaikan bahwa forum wartawan mempermudah proses komunikasi antara jurnalis dan pejabat kementerian sehingga wartawan dapat memperoleh klarifikasi yang lebih cepat mengenai isu kebijakan tertentu.

Namun demikian, wartawan non-forum menekankan bahwa proses pembentukan narasi kebijakan dalam media tidak sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah. Informan [IN1] menyatakan bahwa meskipun informasi dari pemerintah sering menjadi sumber awal pemberitaan, wartawan tetap memiliki otonomi redaksional dalam menentukan sudut pandang berita. Wartawan biasanya melengkapi informasi tersebut dengan perspektif lain, seperti pandangan pelaku industri, akademisi, maupun sumber independen. Informan [IN2] juga menegaskan bahwa independensi redaksi tetap menjadi prinsip utama dalam praktik jurnalistik sehingga pemberitaan tidak hanya mereproduksi narasi pemerintah, tetapi juga melalui proses verifikasi dan interpretasi editorial.

Jika dianalisis dari perspektif komunikasi politik, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah dan media dalam forum wartawan merupakan bagian dari praktik komunikasi politik modern yang melibatkan interaksi antara institusi politik dan media dalam proses produksi informasi publik. McNair menjelaskan bahwa media memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman publik mengenai kebijakan pemerintah melalui proses seleksi dan interpretasi informasi politik [8]. Dengan demikian, narasi kebijakan yang muncul di ruang publik tidak hanya dipengaruhi oleh informasi yang disampaikan oleh pemerintah, tetapi juga oleh proses editorial yang dilakukan oleh media.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan kajian mengenai komunikasi pemerintah yang menunjukkan bahwa strategi komunikasi publik pemerintah sering melibatkan berbagai mekanisme hubungan media untuk memastikan pesan kebijakan dapat tersampaikan kepada masyarakat secara efektif. Penelitian Kriyantono dan Safitri menekankan bahwa praktik *government public relations* yang efektif memerlukan hubungan profesional antara pemerintah dan media agar informasi kebijakan dapat disampaikan secara jelas kepada publik [3]. Selain itu, penelitian mengenai strategi komunikasi pemerintah menunjukkan bahwa media relations merupakan salah satu elemen penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah [4].

Dalam konteks yang lebih luas, interaksi antara pemerintah dan forum wartawan dalam penelitian ini juga dapat dipahami sebagai bagian dari proses *mediatization of government*. Patria menjelaskan bahwa dalam era komunikasi modern, institusi pemerintah semakin menyesuaikan strategi komunikasinya dengan dinamika media agar pesan kebijakan dapat dipahami oleh publik secara lebih luas [2]. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa forum wartawan berfungsi sebagai ruang komunikasi yang mempertemukan kepentingan pemerintah dalam menyampaikan kebijakan dengan kebutuhan media dalam memperoleh informasi yang relevan bagi pemberitaan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa forum wartawan memiliki peran penting dalam memfasilitasi proses penyebaran informasi kebijakan sekaligus dalam pembentukan narasi kebijakan di media massa. Namun demikian, proses tersebut tidak sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah karena media tetap menjalankan fungsi editorialnya dalam memilih, mengolah, dan menyajikan informasi kepada publik. Dengan demikian, hubungan antara pemerintah dan forum wartawan dapat dipahami sebagai proses komunikasi yang bersifat interaktif, di mana narasi kebijakan terbentuk melalui interaksi antara sumber informasi pemerintah dan praktik jurnalistik media.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Forum Wartawan Industri (Forwin) dalam praktik komunikasi publik pemerintah di Kementerian Perindustrian serta bagaimana interaksi antara pemerintah dan media mempengaruhi penyebaran informasi kebijakan kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa forum wartawan berfungsi sebagai mekanisme komunikasi yang memperkuat hubungan antara pemerintah dan media dalam proses distribusi informasi kebijakan sektor industri. Melalui forum tersebut, pemerintah dapat menyampaikan informasi kebijakan secara lebih terkoordinasi kepada jurnalis, sementara media memperoleh akses terhadap sumber informasi yang kredibel dalam proses peliputan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa praktik komunikasi publik pemerintah semakin dipengaruhi oleh dinamika kerja media. Unit kehumasan kementerian tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi kebijakan, tetapi juga menyesuaikan strategi komunikasinya dengan kebutuhan media agar pesan kebijakan dapat dipublikasikan secara lebih efektif. Kondisi ini memperlihatkan adanya proses *mediatization of government*, di mana strategi komunikasi pemerintah semakin dipengaruhi oleh logika media dalam proses penyebaran informasi kepada publik.

Secara teoritis, temuan penelitian ini memperkuat kajian mengenai hubungan timbal balik antara pemerintah dan media dalam komunikasi politik modern. Forum wartawan dapat dipahami sebagai salah satu ruang interaksi yang





mempertemukan kepentingan pemerintah dalam menyampaikan kebijakan dengan kebutuhan media dalam memperoleh informasi yang relevan bagi pemberitaan. Dengan demikian, proses komunikasi publik pemerintah tidak hanya berlangsung melalui mekanisme komunikasi formal, tetapi juga melalui jaringan komunikasi yang terbentuk melalui komunitas jurnalis.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama pada lingkup penelitian yang hanya berfokus pada satu institusi pemerintah serta jumlah informan yang relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan kajian dengan membandingkan praktik komunikasi pemerintah di berbagai kementerian atau lembaga pemerintah lainnya. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat mengeksplorasi peran media digital dan media sosial dalam proses *mediatization* komunikasi pemerintah untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika komunikasi publik di era media modern.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, khususnya kepada Subdirektorat Strategi Komunikasi serta unit pemberitaan dan promosi, yang telah berkenan memberikan dukungan dalam proses penelitian ini. Kesediaan para narasumber untuk berbagi informasi, pengalaman, serta pandangan terkait praktik komunikasi publik di lingkungan Kementerian Perindustrian memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam memperkaya data penelitian, sehingga kajian ini dapat disusun secara lebih komprehensif dan mendalam. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para pengurus serta anggota Forum Wartawan Industri (Forwin) yang telah memberikan kerja sama yang baik selama proses pengumpulan data penelitian. Keterbukaan para jurnalis dalam berbagi pengalaman mengenai dinamika peliputan sektor industri serta hubungan kerja dengan institusi pemerintah menjadi bagian penting dalam memahami praktik komunikasi antara pemerintah dan media dalam konteks penelitian ini.

Selain itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh civitas akademika Universitas Paramadina yang telah memberikan dukungan akademik selama proses penyusunan artikel ini. Secara khusus, penulis menyampaikan penghargaan kepada Ibu Dr. Tatik Yuniarti, S.Sos., M.I.Kom. yang telah berkenan memberikan pandangan serta masukan dari perspektif akademisi, pengamat komunikasi, dan pengamat media. Pandangan tersebut memberikan kontribusi yang sangat berharga dalam memperkuat analisis teoritis serta memperkaya interpretasi hasil penelitian dalam artikel ini. Akhirnya, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian komunikasi publik pemerintah, khususnya dalam memahami dinamika hubungan antara pemerintah dan media dalam praktik komunikasi kebijakan di lingkungan pemerintahan.

## REFERENCES

- [1] S. Hansson, "Government Communication on Social Media: Research Foci, Domains, and Future Directions," *Media and Communication*, vol. 13, no. 1, pp. 1–15, 2025.
- [2] N. Patria, "Mediatization and the Transformation of Government Communication in the Digital Era," *Jurnal Komunikasi Indonesia*, vol. 12, no. 2, pp. 95–110, 2024.
- [3] R. Kriyantono and R. Safitri, "The Excellence Plus Model for Government Public Relations in the New Media Era," *Communicare: Journal of Communication Studies*, vol. 11, no. 2, pp. 101–115, 2024.
- [4] A. Kurniawan, S. Rahmawati, and D. Prasetyo, "Strategic Public Relations for Strengthening Public Trust in Government," *International Research Journal of Business Studies*, vol. 17, no. 1, pp. 55–66, 2024.
- [5] F. Nurfalalah, M. Nuruzzaman, S. Khumayah, and N. Irawan, "Digital Communication Strategy for Government Public Relations in Indonesia and Thailand," *International Journal of Communication and Public Relations*, vol. 9, no. 1, pp. 15–28, 2026.
- [6] A. Sastrawan, "Government Communication Strategy in Policy Implementation: A Case Study of TAPERA," *Jurnal Trias Politika*, vol. 9, no. 2, pp. 85–98, 2025.
- [7] E. Griffin, *A First Look at Communication Theory*. New York: McGraw-Hill Education, 2018.
- [8] B. McNair, *An Introduction to Political Communication*, 6th ed. London: Routledge, 2017.